

**STUDI TENTANG KEKERASAN KORUPSI DALAM BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II DI INDONESIA
SEBUAH KAJIAN PSIKOSOSIAL**

Oleh :
Dr. Zainal Abidin, M.Si



**DISAMPAIKAN PADA TEMU ILMIAH NASIONAL DAN KONGRES XI
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI)
SURAKARTA, 18-20 MARET 2010**

TELAH DICATAT/DIDOKUMENTASIKAN PADA
PERPUSTAKAAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Kepala Perpustakaan



Dr. Ratna Jatnika, MT
NIP. 19632021988032003

Telah diperiksa oleh :
Guru Besar/Dosen Senior

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kusdwiratri Setyono'.

Prof. Dr. Hj. Kusdwiratri Setyono

Mengetahui :
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran



Prof. Dr. Hj. Juke Roosjati Siregar, M.Pd
NIP. 1947111819032001

KETUA BAGIAN PSIKOLOGI KLINIS

Wassana

Drs. H.Hatta Albanik, M.Psi
NIP.194705121981031001

Mengetahui :
Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Padjadjaran



Juke Roosjati Siregar
Prof.Dr.Hj.Juke Roosjati Siregar, M.Pd
NIP.1947111819032001

Terdaftar di Perpustakaan
Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran



**STUDI TENTANG KORUPSI DALAM BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT II DI INDONESIA.
SEBUAH KAJIAN PSIKOSOSIAL**

Oleh:

Zainal Abidin

Fakultas Psikologi, Universitas Padjadjaran, Bandung

Abstract

This study intended to examine more deeply about the civil officer's perception toward corruption, social norm, law enforcement, standards of living, and the effect of those variables towards corruption. Samples are civil servants from 4 cities, that is Yogyakarta (164), Palangkaraya (140), Tegal (123), and Kupang (111). Data retrieval is done by Questionnaires and Focus Group Discussions. The quantitative data are statistically processed with descriptive statistical techniques, ANOVA, and Linear Regression with SPSS 16.0 software support, while the qualitative data from FGDs were analyzed with coding qualitative methods. The conclusion drawn from this research are the perception of corruption, law enforcement, and social norms have an impact on the appearance of corruption behavior, but the perception of living standards does not contribute significantly to the emergence of corruption behavior. The recommendation from this study are : first, it is important to socialize the definition whether the certain behaviors are corruption or not with a clear and distinct definition. Second, the law enforcement and control social must be given as the negative reinforcement to extinct corrupt behavior, third, it is important to make a study with social culture as the 'comprehensive factor' for the corruption behavior.

Key terms : corruption, perception of corrupti behavior, social norms, law enforcement, standards of living, corruption behavior.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan ancaman nyata bagi kemakmuran sebuah bangsa. Ia bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan kesempatan sebagian dari warga negara untuk dapat hidup secara makmur. Oleh sebab itu dapat dipahami jika kita ada pendapat bahwa korupsi pun bertentangan prinsip keadilan, karena dari setiap keuntungan yang diperoleh oleh seorang koruptor terdapat kerugian yang harus ditanggung oleh sejumlah warga negara.

Di Indonesia dewasa ini sedang digalakkan pemberantasan korupsi. Indonesia

merupakan salah satu negara yang oleh sejumlah lembaga asing dikelompokkan sebagai negara terkorup. Meski sebetulnya sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah membawa sedikit kemajuan di bidang pemberantasan korupsi, tapi berarti bahwa negara kita terlepas dari sebutan negara korup. Data terbaru yang dipublikasikan oleh Transparency International (<http://www.transparency.org/2008>) memperlihatkan bahwa skor *Corruption Perception Index* pemerintah Indonesia mengalami peningkatan, dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 Skor CPI Indonesia adalah 2,0, meningkat menjadi 2,4 pada tahun 2006, dan menjadi 2,6 pada tahun 2008. Namun, tidak berarti bahwa peringkat Indonesia lebih baik dari negara-negara lain. Posisi Indonesia masih tetap di peringkat bawah, yakni di urutan 130-an dari 180 negara yang disurvei (<http://www.transparency.org/2008>). Bandingkan misalnya dengan skor CPI negara-negara yang paling bersih dari korupsi, seperti Denmark (9,4), Finlandia (9,4), New Zeland (9,4), Singapore (9,3), dan Swedia (9,3).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah lembaga anti-korupsi di Indonesia seperti *Indonesia Corruption Watch* (2005), Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) (2007), dan *Transparency International Indonesia* (TII) (2009) seakan-akan memberi justifikasi pada sejumlah temuan lembaga-lembaga internasional tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut pada dasarnya mencerminkan betapa kronisnya masalah korupsi di tanah air ini. (<http://www.transparency.org/2008>)

Temuan survey terbaru yang dilakukan oleh TII (2008) mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di 50 kota (pemerintah daerah tingkat II, atau Pemda Tk II) di Indonesia (<http://www.ti.or.id>) menunjukkan bahwa terdapat kota-kota yang tingkat IPK-nya paling tinggi dan paling rendah. Skor IPK tinggi artinya masyarakat (terutama pebisnis) mempersepsi bahwa birokrasi pemerintah daerah setempat relatif bersih, sedangkan skor IPK rendah artinya birokrasi pemerintah daerah setempat relatif korup. Kota-kota "terkorup" antara lain adalah Kupang, Tegal, Manokwari, Kendari, dan Purwokerto ; sedangkan "terbersih" adalah Yogyakarta, Palangkaraya, Banda Aceh, Jambi, dan Mataram.

Penelitian-penelitian yang baru dijelaskan, dan penelitian-penelitian lain yang sejenis, sangat penting sebagai sumber informasi ilmiah untuk mengetahui masalah korupsi di Indonesia. Sayangnya, belum ditemukan penelitian serupa berdasarkan kajian psikologis, khususnya psikososial. Penelitian-penelitian yang tadi disebut lebih berupa kajian ekonomi, hukum, organisasi, dan politik (kebijakan public). Diperlukan kajian dengan perspektif yang berbeda untuk bisa menjelaskan secara komprehensif masalah korupsi di Indonesia. Perspektif dimaksud adalah perspektif psikososial. Korupsi pada dasarnya bukan hanya masalah pelanggaran hukum, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan ekonomi yang bersifat pribadi atau kelompok, kondisi politik yang kondusif untuk disalahgunakan, tapi juga berkaitan dengan masalah persepsi para partisipan yang oleh para pebisnis dan pengamat bisnis dipersepsi sebagai pelaku korupsi. Dengan perkataan lain, perlu kajian mengenai bagaimana para birokrat atau pegawai negeri sipil (PNS atau *civil servants*) mempersepsi korupsi dan bentuk-bentuk perilaku korupsi.

Penelitian seperti itu penting untuk mengidentifikasi salah satu faktor pendorong munculnya korupsi dan meramalkan perilaku korupsi. Secara psikologis, persepsi dapat mempengaruhi tingkah laku (Goldstein, 2000; Baron, Byrne, and Newcomb, 2006), termasuk tingkah laku korupsi. Persepsi adalah proses memberi makna pada stimulus tertentu dan pemaknaan tersebut pada gilirannya dapat mempengaruhi tingkah laku terkait dengan stimulus tersebut. Misalnya, seorang pegawai negeri sipil (PNS) mempersepsi tingkah laku menerima hadiah dari masyarakat yang sedang mengurus perizinan sebagai tingkah laku yang lazim dan tidak melanggar hukum. Persepsi seperti ini dapat mendorong PNS itu untuk menerima atau bahkan meminta imbalan dari masyarakat yang sedang mengurus perizinan di kantor tempat PNS itu bertugas. Kemungkinannya akan berbeda jika PNS itu mempersepsi bahwa tingkah laku menerima hadiah itu sebagai tindakan menerima suap atau gratifikasi (dua bentuk tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai korupsi), sehingga dia enggan untuk menerima apalagi meminta imbalan dari masyarakat.

Berdasarkan pada asumsi bahwa persepsi mempengaruhi perilaku, maka kami mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana persepsi PNS atau birokrat yang berasal dari 2 kota yang memiliki skor IPK paling tinggi (Yogyakarta dan Palangkaraya) dan paling rendah (Kupang dan Tegal) terhadap sejumlah stimulus yang berkaitan dengan tingkah laku korupsi. Stimulus-stimulus yang dipersepsi tersebut adalah korupsi, penegakan hukum, norma sosial, dan standar hidup.

Pertama, persepsi korupsi. Diduga ada kecenderungan pada para birokrat atau PNS untuk mempersepsi (memaknakan) suatu tindakan tertentu sebagai sesuatu yang lazim dan bukan korupsi, meski sebetulnya secara hukum tindakan itu adalah korupsi. Persepsi seperti itu pada akhirnya berpengaruh pada tindakan mereka untuk melakukan tindakan korupsi. Contoh konkritnya seperti ini: seorang PNS mempersepsi bahwa menerima uang balas jasa dari masyarakat yang sedang mengurus KTP bukanlah merupakan tindakan korupsi, maka mereka akan terus menerima dan bahkan meminta imbalan dari masyarakat yang mengurus KTP.

Kedua, persepsi tentang penegakan hukum. Persepsi tentang penegakan hukum memiliki peran penting dalam memunculkan tingkah laku melanggar hukum (Abidin, 2005), termasuk korupsi. Jika seorang birokrat mempersepsi bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga teman-teman di lingkungan kerjanya yang melakukan korupsi tidak ditindak baik secara hukum maupun administratif (institusional), maka mereka akan terdorong untuk melakukan korupsi.

Ketiga, persepsi tentang standar hidup. Faktor ekonomi sering diduga menjadi determinan munculnya perilaku korupsi (Svenson, 2005). Orang melakukan korupsi karena penghasilan yang mereka terima dinilai tidak mencukupi untuk hidup. Namun, secara psikologis, cukup atau tidak cukupnya penghasilan tergantung pada standar hidup yang mereka tetapkan. Standar hidup yang melampaui penghasilan perbulan menyebabkan gaji yang mereka terima dinilai kurang mencukupi. Sebaliknya, standar hidup yang sesuai dengan penghasilan yang mereka terima, menjadikan gaji dinilai cukup memadai.

Keempat, persepsi tentang norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau konvensi yang diterima oleh anggota masyarakat dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat itu, baik dalam sikap, keyakinan, maupun tingkah laku. Jika seorang PNS menilai bahwa masyarakat cukup toleran terhadap korupsi, maka dia tidak merasa mengalami hambatan dalam melakukan korupsi, sehingga korupsi menjadi suatu kebiasaan.

Meski demikian, dugaan atau asumsi di atas masih memerlukan pembuktian empiris. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pembuktian empiris terhadap dugaan tadi.

Pada dasarnya, terdapat sejumlah pertanyaan yang akan dicari jawabnya dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah:

1. Bagaimana persepsi PNS tentang korupsi? perilaku-perilaku apa saja yang dapat dikategorikan korupsi dan bukan korupsi?
2. Bagaimana PNS memaknakan nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan sosialnya tentang korupsi? Apakah mereka menilai bahwa masyarakat memandang korupsi sebagai sesuatu yang lazim, karena rekan-rekan PNS lain pun melakukan korupsi?
3. Bagaimana PNS menilai penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi, baik tingkat institusional maupun legal?
4. Standar hidup seperti apa yang dijalani dan diinginkan oleh PNS?
5. Apakah ada perbedaan persepsi/pemaknaan tentang kelima hal tadi diantara PNS dari dua kota yang IPK-nya paling tinggi (Yogyakarta dan Palangkaraya) dan paling rendah (Kupang dan Tegal)?
6. Apakah mereka pernah melakukan suatu tindakan tertentu yang termasuk dalam tindakan korupsi? jika ya, jenis perilaku koruptif seperti apa?
7. Apakah ada pengaruh persepsi PNS tentang korupsi, penegakan hukum, kriteria sukses, norma sosial, dan standar hidup terhadap tingkah laku korupsi? Variabel-variabel persepsi mana saja dari 4 persepsi tersebut (yakni, persepsi tentang korupsi, persepsi tentang nilai-nilai sosial, persepsi tentang

penegakan hukum, dan persepsi tentang standar hidup) yang memiliki kontribusi terhadap tingkah laku korupsi? seberapa besar kontribusinya?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Menurut Creswell (1994), pendekatan kuantitatif merupakan “ *an inquiry into a social or human problem, based on testing a theory composed of variables, measured with numbers, and analyzed with statistical procedures, in order to determine whether the predictive generalization of the theory hold true* (5, 1994). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah “... *inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, holistic picture, formed with words, reporting of informants, and conducted in a natural setting* (1-2, 1994)

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa survey. Melalui survey kami dapat membuat deskripsi dan penjelasan statistik mengenai sejumlah variabel yang diduga berkaitan dengan tingkah laku korupsi, diantaranya: persepsi korupsi, persepsi tentang penegakan hukum, persepsi tentang nilai sosial, persepsi tentang kesuksesan, dan persepsi tentang standar hidup. Melalui teknik ini dapat diidentifikasi perbedaan antara 4 kota yang menjadi sampel penelitian (Kupang, Tegal, Yogyakarta, dan Palangkaraya) dalam kaitannya dengan variabel-variabel tadi. Di samping itu, dapat diketahui juga kontribusi atau pengaruh kelima variabel persepsi terhadap variabel tingkah laku korupsi.

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk menunjang pendekatan kuantitatif. Pengambilan data dalam pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dan focus group discussion (FGD). Tujuan interviu dan FGD dalam penelitian ini adalah mendapatkan informasi mendalam yang tidak ditemukan dalam pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilakukan di empat Pemerintah Daerah (Pemda) Tingkat II Kota di Indonesia, yaitu Kupang, Palangkaraya, Yogyakarta, dan Tegal. Menurut hasil riset Tranparency International Indonesia (TII) keempat kota itu terdiri dari 2 kota yang

dipersepsi oleh masyarakatnya paling tinggi indeks persepsi korupsinya (Yogyakarta dan Palangkaraya) dan 2 kota paling rendah indeks persepsi korupsinya (Kupang dan Tegal). Dengan demikian, penentuan sample awal pada dasarnya dilakukan secara purposif (purposive sampling).

Jumlah sampel dalam penelitian ini 538 responden, dengan perincian sebagai berikut: Kupang (111 orang), Palangkaraya (140 orang), Yogyakarta (154 orang), dan Tegal (123 orang). Mereka adalah para birokrat (PNS) dari sejumlah dinas yang ada di lingkungan Pemda setempat.

Instrumen kuantitatif yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 6 buah angket, yaitu angket: Persepsi korupsi, Persepsi tentang norma sosial, Persepsi tentang penegakan hukum, Persepsi tentang standar hidup, Persepsi tentang kriteria sukses, dan Tingkah laku korupsi. Sedangkan instrumen untuk pengambilan data kualitatif adalah berupa interview guide untuk wawancara dan FGD guide untuk focus group discussion. Interview dilakukan di setiap kota terhadap sejumlah pejabat pemda setempat, sedangkan FGD dilakukan terhadap para staf dari sejumlah dinas Pemda setempat. Di samping itu, untuk cross check data dan untuk mendapatkan informasi tambahan, kami pun melakukan wawancara ke sejumlah tokoh masyarakat (akademisi) dan penduduk setempat (berkisar antara 2 sampai 4 orang di setiap kota).

Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 17 Agustus 2009 sampai 22 Oktober 2009. Lokasi pengambilan data pertama adalah Pemda Kupang (17 – 22 Agustus 2009), Palangkaraya (14 – 18 September 2009), Yogyakarta (11 - 14 Oktober 2009), dan terakhir Tegal (18 – 22 Oktober 2009).

Data kuantitatif dianalisis melalui analisis statistik deskriptif dan inferensial, menggunakan program SPSS versi 15 dan 17. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 dilakukan dengan cara menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi dari total data masing-masing variabel dan item-itemnya dengan. Untuk menjawab pertanyaan 5 digunakan teknik statistik analisis varians (*general linear model*). Sedangkan untuk menjawab pertanyaan 8 digunakan teknik analisis statistik *multiple regression*.

Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan analisis coding, yaitu mengkategorisasikan sejumlah pernyataan responden hasil FGD ke dalam variabel-variabel penelitian dan membuat tema-tema baru jika pernyataan-pernyataan tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam variabel-variabel yang sudah ada tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan beberapa fakta berikut ini:

Ada perbedaan menarik dalam hal bagaimana para PNS mempersepsi korupsi di antara kota Kupang dan Yogyakarta di satu pihak dengan kota Tegal dan Palangkaraya di pihak lain. Dua kota yang disebut terakhir relatif memiliki persepsi yang lebih longgar mengenai korupsi dibandingkan kota Kupang dan Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa PNS di Kota Tegal dan Palangkaraya tidak mempersepsi secara tegas mengenai perilaku-perilaku korupsi dibandingkan dengan di Kota Yogyakarta dan Kupang. Di Tegal dan Palangkaraya tidak satu pun perilaku yang sebetulnya korupsi dipersepsi sebagai jelas-jelas korupsi, sedangkan di Yogyakarta ada 6 perilaku yang dinilai sangat kuat atau jelas sebagai korupsi (skor mean di atas 8) dan 3 perilaku di Kupang. Selain itu, PNS di Kota Tegal menilai 2 perilaku bukan korupsi dan kota Palangkaraya menilai 3 perilaku bukan korupsi, padahal di Kota Kupang dan Yogyakarta perilaku-perilaku tersebut adalah korupsi.

Ada perbedaan menarik dalam bagaimana para PNS mempersepsi korupsi di antara kota Kupang dan Yogyakarta di satu pihak dengan kota Tegal dan Palangkaraya di pihak lain. Dua kota yang disebut terakhir relatif memiliki persepsi yang lebih longgar mengenai korupsi dibandingkan kota Kupang dan Yogyakarta. Data menunjukkan bahwa PNS di Kota Tegal dan Palangkaraya tidak mempersepsi secara tegas mengenai perilaku-perilaku korupsi dibandingkan dengan di Kota Yogyakarta dan Kupang. Di Tegal dan Palangkaraya tidak satu pun perilaku yang sebetulnya korupsi dipersepsi sebagai jelas-jelas korupsi, sedangkan di Yogyakarta ada 6 perilaku yang dinilai sangat kuat atau jelas sebagai korupsi (skor mean di atas 8) dan 3 perilaku di Kupang. Selain itu, PNS di Kota Tegal menilai 2 perilaku bukan

korupsi dan kota Palanglaraya menilai 3 perilaku bukan korupsi, padahal di Kota Kupang dan Yogyakarta perilaku-perilaku tersebut adalah korupsi.

Hasil analisis mengenai persepsi tentang norma sosial, ditemukan kesamaan umum di antara keempat kota dalam menilai situasi “keluarga senang jika suami atau istri menerima hadiah dari kliennya. Temuan ini sebetulnya menunjukkan justifikasi atas dugaan sejumlah pendapat bahwa masyarakat (termasuk keluarga) kita memberikan pembenaran atas pemberian dan penerimaan hadiah, misalnya dalam bentuk *parcel*, Alasannya adalah, si penerima hadiah memiliki pengaruh yang besar, *powerful* terhadap orang lain (pemberi hadiah). Hal ini menimbulkan rasa bangga pada anggota keluarga penerima hadiah. Di Kota Palangkaraya bahkan, keluarga menganggap wajar jika PNS diberi tiket pesawat oleh anggota masyarakat.

Hasil analisis terhadap persepsi penegakan hukum menunjukkan bahwa keempat kota yang menjadi sampel penelitian ini secara bersama-sama menilai bahwa telah terjadi peegakan hukum di kota mereka. Temuan dari data kuantitatif ini sangat berbeda dari temuan kualitatif yang menunjukkan bahwa hanya PNS di Kota Yogyakarta dan juga Palangkaraya yang menilai secara sangat kuat bahwa hukum dan juga sistem di kantor pemda sudah sangat kuat ditegakkan. Di Yogyakarta misalnya sejumlah PNS mengaku takut melakukan pelanggaran karena hukum telah berjalan dengan sangat ketat. Pengakuan serupa tidak ditemukan dari PNS-PNS di kota-kota lain.

Temuan mengenai persepsi tentang standar hidup menunjukkan bahwa Tegal, Yogyakarta, dan Palangkaraya relatif menerima dengan ikhlas kondisi hidup yang menjadi standar hidup mereka. Perbedaan justru ditemukan di Kupang. Di kota ini para PNS pada umumnya mengaku bahwa standar hidup dianggap tidak sesuai dengan yang diinginkan. Bahkan menjadi PNS itu pun diakui oleh mereka bukan yang mereka harapkan, karena gaji PNS relatif kecil. Perlu diduga bahwa benih-benih korupsi berasal dari ketidak-puasan atas kondisi ekonomi, dari lebarnya jurang antara standar hidup yang diidamkan dengan capaian untuk meraih standar hidup itu.

Terkait dengan temuan tentang tingkah laku korupsi ditemukan fakta

menarik. Pada umumnya PNS di Kupang mengaku tidak pernah melakukan satu pun jenis perilaku korupsi, bahkan dengan kuat mereka menyatakan tidak akan pernah meminta apa pun dari masyarakat yang sedang mengurus urusannya di kantor pemerintah. Demikian juga dengan Yogyakarta, yang mengaku tidak akan pernah menerima amplop. Hanya kota Tegal dan Palangkaraya yang mengaku pernah melakukan korupsi, yakni dalam bentuk meminjam sarana kantor untuk urusan keluarga (Palangkaraya dan Tegal), menerima pemberian dari masyarakat yang mengurus urusan di kantor PNS (Palangkaraya), dan memberi kepada seseorang yang mengurus kenaikan pangkat (Palangkaraya).

Data kualitatif (hasil wawancara dan FGD) dari PNS Yogyakarta menunjukkan temuan menarik, yang patut diduga sebagai salah satu faktor penting yang menyebabkan kenapa Yogyakarta memiliki IPK yang paling tinggi. Ada beberapa penyebab yang teridentifikasi. Pertama, ketatnya kontrol organisasional yang berasal dari berjalannya sistem pelayanan satu atap. Di dalam ruangan pelayanan satu atap itu pun terdapat circuit camera television (CCTV), sehingga tertutup peluang beredarnya calo-calo yang mengklaim dapat mempercepat urusan dengan kantor pemerintah dan memperkecil kemungkinan adanya pungutan liar. Kedua, semua pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat tidak dibayarkan kepada petugas di *desk*, tetapi melalui bank yang letaknya ada dalam ruang satu atap. Ketiga, ketatnya kontrol sosial dari masyarakat, khususnya dari kalangan akademis, pers, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kontrol ini dipersepsi bukan secara negatif, melainkan secara positif. Berbeda dari respons para PNS di kota-kota lain, PNS Yogyakarta menyebut komponen-komponen masyarakat tadi sebagai “teman-teman pers”, “teman-teman LSM”, “teman-teman dari kampus”. Di kota-kota Kupang dan Tegal responsnya agak negatif. Keempat, muncul kata-kata “malu” pada para peserta FGD. Ketika ditanya kenapa tidak ada dorongan melakukan korupsi, salah satu kata yang paling sering diungkap adalah “malu”. Kata ini tidak pernah muncul dari responden kota-kota lain selain Yogyakarta.

Kelima, penegakan hukum. Meski pada umumnya PNS di semua kota

memperspeksi bahwa penegakan hukum telah berjalan, tetapi hanya di Yogyakarta wujudnya paling nyata, yaitu mereka takut terhadap hukum. Pernyataan “takut” muncul secara tematik di hampir semua FGD di beberapa dinas Kota Yogyakarta. Kata ini tidak muncul di kota-kota lain.

KESIMPULAN

Dari sejumlah temuan dalam penelitian ini dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa PNS di beberapa kota seperti Palangkaraya dan Tegal mempersepsi suatu perilaku sebagai korupsi, jika perilaku itu merugikan keuangan negara dan jika mereka meminta sesuatu barang atau uang dari masyarakat. Namun, jika mereka menerima pemberian uang atau barang dari masyarakat yang sedang mengurus suatu urusan di kantor tempat mereka bekerja (kantor pemerintah), tindakan itu bukan korupsi. Hanya PNS di Kota Yogyakarta yang secara tegas mempersepsi bahwa suatu perilaku adalah korupsi jika mereka menerima apa pun secara tidak legal dan penerimaan itu terkait dengan jabatan mereka.
2. Sebagian besar PNS di empat kota pada umumnya mengakui bahwa keluarga (istri/suami, anak) akan senang jika mereka menerima hadiah dari kliennya. Ini berarti bahwa menerima hadiah mendapatkan pembenaran social dari keluarga.
3. Pada umumnya PNS di empat kota mengakui bahwa penegakan hukum telah berjalan secara tegas. Namun, berbeda dari kota-kota lainnya, di Yogyakarta bukan hanya penegakan hukum formal yang dipersepsi tegas, tetapi juga sistem institusional. Di kota dengan tingkat IPK tinggi (Yogyakarta), sistem yang berlaku di institusi pemda memiliki dampak “menakutkan” pada PNS. Artinya, penegakan sistem yang tegas dapat menghambat dorongan untuk melakukan korupsi.
4. Persepsi tentang standar hidup. Pada umumnya dua kota yang IPK-nya tinggi

(Yogyakarta dan Palangkaraya) relatif lebih menyukai hidup dan mempersepsi bahwa hidup sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebaliknya, kota yang IPK-nya rendah (Kupang) relatif kurang menyukai kehidupan

5. Sejumlah PNS di kota Palangkaraya dan Tegal, dan beberapa PNS dari Kupang, mengaku pernah menerima pemberian dari anggota masyarakat yang sedang mengurus urusannya di kantor pemerintah. Sebagian dari PNS di Palangkaraya bahkan mengaku pernah memberi uang kepada petugas yang mengurus kenaikan pangkat.
6. Secara umum dapat dikatakan bahwa persepsi mengenai korupsi, penegakan hukum, dan norma social memiliki pengaruh terhadap munculnya korupsi ($p < 0,05$). Namun persepsi mengenai standar hidup dalam arti sejauh mana subjek puas atau tidak puseranya terhadap standar hidupnya sekarang ini dengan penghasilan yang diperoleh, tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap munculnya perilaku korupsi ($p > 0,05$).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. Psikologi Korupsi di Indonesia. Kompas, 15 Juli 2008
- Abidin, Z. "Pesan Moral kasus Urip-Artalyta", dalam Jangan Bunuh KPK. 2009. Jakarta: Gramedia.
- Abidin, Z. Koruptor Berseragam? Gatra, 4 September 2008
- Baron, R.A.; Branscombe, N.R.; Byrne, D.. 2008. Social psychology. (twelfth edition). Boston: Pearson
- Bartol & Bartol, 2008. Criminal behavior. A psychosocial approach. Pearson International Edition
- Blackburn, Ronald. 2001, The Psychology of criminal conduct. Theory, research, and process. New York: John Wiley & Sons, Ltd
- Colombatto, Enrico. 2003. Why is Corruption Tolerated? The Review of Austrian Economics, 16:4, 363–379. Kluwer Academic Publishers. Manufactured in The Netherlands.
- Dyke, L.S & Murphy, Steven A. 2006. "How we define success: A qualitative study of what matters most to women and men". Sex roles (2006). 55: 357-71. DOI 10. 1007/s11199-006-9091-2
- Godwin, G.M. 2001. Criminal psychology and forensic technology. A collaborative approach to effective profiling. London: CRC Press
- Goldstein, E. Bruce, 2002. Sensation and perception. Pacific Grove: Wordsworth
- Gopinath, C. 2008. "Recognizing and justifying private corruption". Journal of Business Ethics (2008) 82; 747-754. DOI 10.1007/s10551-007-9589-8
- Gorta, A.. 1998. Minimising corruption: Applying lessons from the crime prevention literature. In Crime, law & Social change, 30, 67-68.
- ICW. 2000. Hasil survey korupsi di pelayanan publik. Laporan Penelitian Tim Peneliti Departemen Riset dan kajian Strategis ICW
- Kemitraan bagi pembaharuan pemerintahan di Indomesai. 2002. Survey mengenai korupsi di Indomesai. Laporan Penelitian, Februari 2002
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- KPK. 2006. Kondisi dan strategi. Annual report 2006
- KPK. Integritas Sektor Public. 2007. Survey Report
- Lancaster,, T.D & MONTINOLA, Gabriella. 1997. Toward a methodology for the comparative study of political corruption. *Crime, Law & Social Change* 27: 185–206, 1997. 185 c. 1997 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands.
- Li, S.; Triandis, H.C.; Yu, You. 2006. Cultural orientation and corruption. In *Ethics & behavior*, 16(3), pp.199-215
- Li, Shu; Triandis, H.C., & Yu, You. 2006. Cultural orientation and corruption. *ETHICS & BEHAVIOR*, 16(3), 199–215. Copyright © 2006, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Liu, Zuhua. 2007. Understanding corruption through a cross-national comarison. A dissertation submitted to the Faculty of the Graduate School of the State of University of New York at Buffalo in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Department of Political Science
- Pellegrini, L. & Gerlagh, Reyer. 2007. Causes of corruption: a survey of cross-country analyses and extended results. *Econ Gov* (2008) 9:245–263. DOI 10.1007/s10101-007-0033-4. © Springer-Verlag 2007
- Quah, John. S.T.. 1999. Corruption in Asian Countries: Can it be minimized? *Public administrative review*, vol.59, No.6 (Nov – Dec), pp.483-494. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3110297>. accessed: 18/07/2008
- Rinaldi, T., Purnomo, M., Damayanti, D. 2007. Memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi. Bank Dunia: justice for the poor project
- Robertson-Snape, F. 1999. Corruption, Collision, and nepotism in Indonesia. *Third world quarterly*, vol.20, No 3, The New politics of corruption (Jun.) pp.589-602. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3993323>. Accessed: 18/07/2008
- Schaefer, R.T. 2006. *Sociology. A brief introduction*. Sixth edition. McGrawHill
- Svensson, Jacob. 2005. Eight questions about corruption. *Journal of economic perspectives*. Volume 19, Number 3, Summer, p.19-42
- Undang-undang (UU) No 31 tahun 1991 jo UU No 20 Tahun 2001

- Wilhelm, Paul G. 2002. International validation of the corruption perceptions index: Implications for business ethics and entrepreneurship education. In *Journal of Business ethics*, 35, 177-189
- Zyglidopoulos, S; Fleming, P.; Rothenberg, S.. 2008. Rationalization, overcompensation and the escalation of corruption in organizations. *Journal of business ethics*. DOI 10.1007/s10551-008-9685-4. © Springer-Verlag 2008
- Wu, Xun. 2008. Determinants of Bribery in Asian Firms: Evidence from the World Business Environment Survey. *Journal of Business Ethics* _ Springer 2008. DOI 10.1007/s10551-008-9871-4.
- Wilhelm, Paul. 2002. International Validation of the Corruption Perceptions Index: Implications for Business Ethics and Entrepreneurship Education. *Journal of Business Ethics* 35: 177–189, 2002. Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands

**Jadwal Presentasi Lisan Paralel****TEMU ILMIAH NASIONAL & KONGRES HIMPSI XI 2010****JUMAT, 19 MARET 2010, 14.00 – 15.30**

No	KELOMPOK	
	L 1.A1 (Ballroom 1-1) Moderator: Heri Mikarsa	L 1.A2 (Ballroom 1-2) Moderator: Beng Panggabean
1	Pengaruh Saliansi Mortalitas dan Identifikasi Sebagai Orang Indonesia Terhadap Intensi Membeli Produk Dalam Negeri (Harry Susianto & Mega Puji Saraswati)	Filosofi hidup nrimo dan gotong royong dalam membangkitkan semangat hidup survivor gempa 27 Mei 2006 di Yogyakarta (Nurika Nugraheni & Kwartarini W.Y.)
2	Kearifan Ekologis Tengger: Studi Etnografi tentang Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Ekologis Masyarakat Adat Tengger (Ilham Nur Alfian & Listiono Santoso)	Dinamika Psikologis <i>Nerimo</i> dalam Bekerja: <i>Nerimo</i> Sebagai Motivator atau Demotivator ? (Ridwan Saptoto)
3	Mekanisme Lokal dalam Resolusi Konflik dan Rekonsiliasi (Ichsan Malik)	Proses somatisasi dan strategi koping pada individu alosentris (Tjipto Susana)
4		Perilaku agresif pada budaya carok di Madura ditinjau dari kematangan emosi dan kontrol diri (Toyibah & Kwartarini W.Y.)

No	KELOMPOK	
	L 1.A3 (Ballroom 2-1) Moderator: Miranda Zamri	L 1.A4 (Ballroom 2-2) Moderator: Dian Ayu Witasari
1	Transformasi Kelamin, Independensi Gender dan Peran Psikososial (Jony Eko Yulianto & Ilham Nuralfian)	Nilai-nilai Terapeutik Permainan Tradisional Engklek pada Anak Usia Sekolah Dasar (Iswinarti)
2	<i>Ngawet</i> and the Psychomotoric Balancing (Novita Triutama Dewi, Kwartarini W.Y.)	Sepakbola Nasi Sebagai Tradisi Bersih Desa (Ninung Endang Susilowati, dkk.)
3	Eksplorasi Properti Psikometris Butir <i>Children's Depression Inventory</i> (CDI), versi Bahasa Indonesia melalui Teori Respons Butir (Sofia Retnowati & Wahyu Widhiarso)	Managing Diversity into Sinergy: Increasing Ethnocultural Empathy by The Traditional Game of Javanese and Chinese Children (Taufik)
4	Problem Perkembangan Psikososial pada Anak, Remaja dan Lanjut Usia di Masyarakat Pedesaan (Wisjnu Martani & Endang Ekowarni)	Solo: Fenomena "Deso"politan menuju Mesopolitan, Potret Perubahan Perilaku Pebisnis Jajanan Kuliner Malam (Yadi Purwanto)

No	KELOMPOK	
	L 1.A5 (Triwindu-1) Moderator: Juni Kuntari	L 1.A5a (Triwindu-2) Moderator: Susatyo Yuwono
1	Konflik intrapersonal wanita lajang terhadap tuntutan orangtua untuk menikah (C.L.Dian Noviana & E. Sri Tyas Suci)	Konflik pengusahaan industri peternakan babi di pemukiman padat penduduk di desa Mencle (sebuah studi kasus psikologi industri dalam perspektif psikologi komunitas (Nur Muhlashin & Koentjoro)



Jadwal Sidang Ilmiah

Jam	Acara	Kode	Ruang
09.00 – 09.30	Keynote Speech Wakil Gubernur Jawa Tengah : Rustriningsih		Ballroom
10.00 – 11.30	Pleno I 1.Uichol Kim 2.Djamaludin Ancok Moderator : Urip Purwono	U.1	
14.00 – 15.30	Sidang ilmiah paralel 1 (6 ruang)	L.1.	
16.00 – 17.30	Sidang ilmiah paralel 2 (6 ruang)	L.2.	
09.00 – 13.00	Presentasi poster paralel 1	P.1	
13.30 – 17.30	Presentasi poster paralel 1	P.2	
08.30 – 09.45	Pleno II 1. Komisariss TransTV dan Trans7: Ishadi SK. 2. Walikota Surakarta : Joko Widodo Moderator : Marina Tusin	U.2	Ballroom
10.00 – 12.00 Simposia Paralel 1 :	Good Governance - Maswita Djaja - Supra Wimbari - Abdul Malik - Josephine MJ Ratna Moderator: Josephine R. Marrieta	S.1	Ballroom
Simposia Paralel 2 :	Indigeneous Psychology - Uichol Kim - Moordiningsih - Hana Panggabean Moderator: Hera Lestari Mikarsa	S.2	Ballroom 1-1
Simposia Paralel 3 :	Media, Kreativitas, dan Seni - Uti Rahardjo - Danny Yatim Moderator: Ndaru Kuntoro	S.3	Ballroom 1-2
Simposia Paralel 4 :	Psikometri - Urip Purwono - Vina G. Pendit - Fendy Suhariadi - Adriana Ginanjar Moderator: Harry Susianto	S.4	Ballroom 2-1
Simposia Paralel 5 :	Psikologi dan Politik - Iwan Prayitno - Hamdi Muluk - Najelaa Shihab Moderator: Retno Dewanti Purba	S.5	Ballroom 2-2
13.00 – 15.00	Sidang ilmiah paralel 3 (6 ruang)	L.3.	
15.30 – 17.00	Sidang ilmiah paralel 4 (6 ruang)	L.4	
08.00 – 12.15	Presentasi poster paralel 3	P.3	
12.30 – 17.00	Presentasi poster paralel 4	P.4	



No	KELOMPOK	
	L 1 A6 (Ballroom 1-1) Moderator: Miki Kuntjar	L 1 A5a (Ballroom 2) Moderator: Susatyo Yuwono
2	"Shop 'til you drop!" Belanja impulsif dan rasa kesepian pada wanita lajang (Nania Permata Sari & E. Sri Tyas Suci)	Mengapa Anak Percaya atau Tidak Percaya Pada Ayah? (Sri Lestari & Kwartarini W.Y.)
3	Psikologi Perempuan: antara integrasi dan kontekstualisasi dalam psikologi (Nani Nurrachman)	Dasar Kepercayaan terhadap Teman: Suatu studi indigenous (Sutarimah Ampuni & Moh.Abdul Hakim)
4	Profil Kelelahan pada Wanita Bekerja dan Ibu Rumah Tangga (Rohmah Rifani)	

JUMAT, 19 MARET 2010, 16.00 – 17.30

No	KELOMPOK	
	L 2 A6 (Ballroom 1-1) Moderator: Endang Widyanti	L 2 A7 (Ballroom 1-2) Moderator: Wisnu Mahandri
1	Studi Eksplorasi Peta Emosi Orang Rimba (Achmanto & Kwartarini W. Y.)	Orientasi Kebahagiaan Mahasiswa S1 Psikologi UGM Dilihat dari Tingkat Pendapatan Masing-masing Keluarga (Anisti Anggraeny & Kwartarini W.Y.)
2	Karakteristik Pribadi Korban School Bullying (Lusi Nuryanti, dkk.)	Disruption of family structures as a result of work demands and its effect on the individual, family and job related domain. (Emi Zulaifah)
3	Gambaran Stress, Coping, dan <i>Perceived Social Support</i> pada Mahasiswa Skripsi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya (Theresia Indira Shanti)	Gambaran <i>Grief</i> pada Keluarga dengan Anak Usia Remaja (Lifina Dewi Pohan)
4	Strategi coping dalam menghadapi restrukturisasi organisasi pada karyawan PT. Patra Niaga (Widi Garnakusumah & Fathul Himam)	

No	KELOMPOK	
	L 2 A8 (Ballroom 2-1) Moderator: Moedjingsih	L 2 A9 (Ballroom 2-2) Moderator: Irena Guntur
1	Hubungan antara Pengetahuan tentang Hepatitis A dengan Pemilihan Makanan pada Remaja (Joice Meiliana & Wahyu Widhiarso)	Berpikir Desain: Faktor kunci Terbitnya Indonesia Kreatif (Budi Setiawan M)
2	Mengoptimalkan peran psikologi sebagai ladang bisnis dan pelayanan yang seimbang (Retno I. Kusuma, Ni Made Trisna S.)	Keberagaman Value Dan Upaya Peningkatan Kinerja (Cholichul Hadi)
3	Pandangan profesional psikologi terhadap kode etik: penerapan dan aplikasi di Makassar (Rohmah Rifani)	Saling Kerjasama Positif dalam Keberagaman (Cholichul Hadi)



No	KELOMPOK	
	L2.A9 (Ballroom 2-1) Moderator: Moerdiningsih	L2.A9 (Ballroom 2-2) Moderator: Itele Guntur
4	Psikologi Industri & Organisasi: Perkembangan, Layanan, dan Tantangannya (Seger Handoyo)	"Unity in diversity: We are Indonesian and pluralism is our origin" Searching for meaning of self understanding as an Indonesian by using a reflective method (Saurma Imelda Christina Hutapea)

No	KELOMPOK	
	L2.A10 (Triwindu -1) Moderator: Ilipic Susana	L2.A10a (Triwindu -2) Moderator: Isnawati Ruhana
1	Values and Political Group Membership (Moh. Abdul Hakim & Helly P. Soetjipto)	Assertiveness of Passive Smoker in Ewuh Pekewuh Culture (David Hizkia Tobing & Kwartarini W. Y.)
2	Wayang Kulit dalam kajian Social Cognitive Approach (Helly P. Soetjipto)	Modal Sosial (<i>Social Capital</i>) Masyarakat Jawa Timur dalam Upaya Menyelesaikan Konflik Politik di Masyarakat (Suryanto, dkk.)
3	Membangun Karakter Kepemimpinan: Sebuah Studi Kasus pada Leadership Development Program di Compassion Indonesia (Henndy Ginting)	Pandangan muslim Tionghoa terhadap perayaan imlek di Surakarta (Maziya Zulfina Jamilah, dkk.)
4	Introduction to LeadershipLAB: A Competency Based Executive Development Program (Henndy Ginting)	Perubahan Persepsi Etnis Tionghoa terhadap Makna Upacara-upacara <i>Life Cycle</i> . (Ninawati, dkk.)

SABTU, 20 MARET 2010, 13.00 - 15.00

No	KELOMPOK	
	L3.B1 (Ballroom) Moderator: Hana Panggabean	L3.B2 (Ballroom 1-1) Moderator: Itele Guntur
1	Pengembangan Model Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Lembaga Politik (Faturachman & Uichol Kim)	Adversity Quotient dalam Drama Seri Studi Perbandingan antara Indonesia dan Korea (Diyah Sulistiyorini)
2	Potret Kepercayaan (<i>Trust</i>) terhadap Individu dan Institusi (Faturachman, dkk.)	Sebuah Gambaran Mencari Ikatan Nilai-nilai dari Cerita Rakyat Indonesia dan Nilai-nilai Pancasila: Konteks Sumatra dan Jawa (Eko A Meinarno)
3	How Male & Female Trust to Stranger: An Indigenous Psychological Analysis (Indrayanti, dkk.)	Ciri Kepribadian Pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi (Neila Ramdani)
4	Trustworthiness in Trusting Parents & Close Friend among Adolescent (Indrayanti, dkk.)	Generasi Digital dan Kualitas Komunikasi: Apakah Media dan Topik Diskusi Menentukan Kualitas Komunikasi Bagi Generasi Digital? (Neila Ramdani)
5	Trust of Politicians in Indonesia: In Search of Integrity (Moordiningsih)	Blog Phenomenons as an Expression of Self-actualization: A descriptive exploratory study (Oktavianus Ken Manungkarjono & Kwartarini W.Y.)



No	KELOMPOK	
	L.3.B1 (Ballroom 1) Moderator: Harahat Kusumadewi	L.3.B2 (Ballroom 1) Moderator: Ietje Guani
6		Persepsi Sosial dan Kebenaran Logis dalam Buku <i>Membongkar Gurita Cikeas: Implikasinya terhadap Perubahan Citra Pemerintah</i> (Saifur Rohman)

No	KELOMPOK	
	L.3.B3 (Ballroom 1-2) Moderator: Dhuha Kanti	L.3.B4 (Ballroom 2-1) Moderator: Endang Eksono
1	Penanganan Autisme dan ADHD dengan Pendekatan Humanistik Terintegrasi (Amelia Pramono & Zakarija Achmat)	Lagu-lagu Tradisional untuk Pengembangan Terapi Bermain pada Anak-Anak (Yeremia Agoes Dariyo)
2	Pengalaman Terapis dalam Psikoterapi Transpersonal (Hendro Prabowo)	Psikoterapi Transpersonal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Individu (Endang Fourianalisyawati)
3	Pengalaman Transpersonal ODHA pada Konseling Sebaya Transpersonal (Fiertrika Primadewi)	<i>Spiritual Emotional Freedom Technique- The New Healing - Technology For Healing, Success Happiness & Greatness.</i> (Endy Fatah Joesoef)
4	<i>Cognitive Behavior Therapy (CBT)</i> untuk Mengurangi Simptom Halusinasi dan Perilaku Terdisorganisasi pada Anak dengan Skizofrenia. (Amelia Pramono & Zakarija Achmat)	<i>Nature Deficit Disorder</i> : Dampak dan Penanganannya (Eveline Sarintohe)
5	Pengaruh Pemberian Dongeng Bertema Prosocial Terhadap Penurunan Perilaku Agresif Anak (Anggraeni & Siti Suminarti F)	Pembentukan Perilaku Damai di Kalangan Remaja: Analisis <i>Interpretative Phenomenological Analysis</i> terhadap Proses Konseling (Latipun)
6	Mengubah Perilaku Merokok dengan <i>Subliminal Conditioning</i> : sebuah penelitian eksperimental (Whisnu Thomas & Eunike Sri Tyas Suci)	Soft Skills dan Penanggulangan Parilaku Kekerasan Siswa SMAN di Sulawesi Selatan (Syamsul Bachri Thalib)

No	KELOMPOK	
	L.3.B5 (Ballroom 2-2) Moderator: Miranda Zaria	L.3.B6 (Trwindu 1) Moderator: Wisnu Martani
1	Analisis Indigenus : Peran Orangtua dan Keluarga terhadap Pencapaian Prestasi Siswa SMP di Jawa (Dinik Rusinani)	Efektivitas Pelatihan Keterampilan Penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI) bagi Siswa Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif di Yakarta (Frieda Mangunsong, dkk.)
2	Pelatihan Cerdas Angka: Perancangan dan Pelaksanaan Program untuk Meningkatkan Pemahaman Guru TK S mengenai Konsep Dasar Penjumlahan dan Pengu-rangan Bilangan pada Anak Usia 4-5 tahun (Fitri Ariyanti Abidin, dkk.)	Pengembangan Literasi dengan Pendekatan Multisensori (Lisnawati Ruhaena)



No	KELOMPOK	
	L3.B5 (Ballroom 2-2) Moderator: Miranda Zamra	L3.B6 (Ballroom 1-1) Moderator: Winda Mahani
3	Dinamika Pencapaian Prestasi Remaja Jawa (Irine Kurniastuti & Faturachman)	Persepsi terhadap kompetensi guru dan kecemasan menghadapi ujian nasional (UN) pada siswa kelas IX SMP N 9 Semarang (Rizka Putri Ayuningtyas, dkk.)
4	Trend Prestasi Matematika 1999, 2003 dan 2007 Suatu Analisis dengan memperhitungkan Faktor Psikologis Siswa Berdasar data TIMSS (Jahja Umar, dkk.)	Profil Kemampuan Memahami Bacaan Ditinjau dari Komponen-komponen dalam Proses Membaca (Sri Tiatri)
5	Karakteristik Kesulitan Belajar Akademik pada Siswa Sekolah Dasar di Surabaya (Pramesiti P. Paramita)	Pengaruh Faktor-Faktor Protektif Internal dan Eksternal pada Resiliensi Akademis Siswa Penerima Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM) di SMA Negeri di Depok (Frieda Mangunsong & Hartuti)
6	Influence of Jemari Smart Mathematic (JIMATH) Game to Upgrade Memorize ability in Multiplication in 1 to 10 Subject of third grade Elementary School (Sugiarto & Mula Kartika Yudha)	Keterikatan Siswa (<i>Student Engagement</i>) sebagai mediator Kompetensi Emosi dan Prestasi Akademik (I Wayan Dharmayana)

SABTU, 20 MARET 2010, 15.30 – 17.00

No	KELOMPOK	
	L4.A11 (Ballroom 1-1) Moderator: Diah Anni Wilasari	L4.A12 (Ballroom 1-2) Moderator: Nida Susanti
1	Penguatan Sumber daya Insani (Hardani Widhiastuti)	Keberfungsian Aitem Diferensial pada Tes Potensi Ujian Masuk UGM (Haryanta)
2	<i>General Survey on Religiosity and Spirituality of Undergraduate Students</i> (Robert Oloan Rajagukguk)	Konstruksi Dan Identifikasi Properti Psikometris Instrumen Pengukuran Kebahagiaan berbasis pendekatan <i>Indigenous Psychology</i> (Wahyu Jati Anggoro & Wahyu Widhiarso)
3	Sensitivitas SARA-SOSEK menjelang PILKADA kota Solo Studi investigatif 2005 dan 2010 (Yadi Purwanto)	Eksplorasi Dampak Respons Tipuan terhadap Properti Psikometris Skala Psikologi (Wahyu Widhiarso)
4	Studi tentang korupsi dalam birokrasi Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia, sebuah kajian psiko social (Zainal Abidin, dkk.)	Aplikasi Pemodelan Persamaan Struktural dalam Pengujian Model Pengukuran Psikologi (Wahyu Widhiarso)

No	KELOMPOK	
	L4.A13 (Ballroom 2-1) Moderator: Moordingsih	L4.A14 (Ballroom 2-2) Moderator: Fani Kusri
1	Uji Validitas Skala Trait Kewirausahaan Indonesia : Dengan Metode Confirmatory Factor Analysis dan Exploratory Factor Analysis (Angela Oktavia Suryani)	Mengendalikan <i>social desirability</i> sebagai upaya penajaman validitas (Hartana, G.T.B., dkk.)



No	KELOMPOK	
2	Benarkah <i>Progressive Matrices Test</i> hanya mengukur satu faktor? (Aries Yulianto)	Menyidik keberadaan <i>social desirability</i> (SD) pada variabel penelitian perilaku (Jaya. E.S., dkk.)
3	Differential Item Functioning (DIF) pada <i>Advanced Progressive Matrices Test</i> (Aries Yulianto)	<i>Personnel Cognitive Ability Test: A Newly Developed Screening Test for Employee Selection in Indonesia</i> (Urip Purwono, dkk.)
4	Pentingnya Pendekatan Multilevel dalam Penelitian Perilaku Keorganisasian (Nilam Widayarni)	Tes Kemampuan Belajar (TKB) sebagai salah satu bentuk Tes Potensi akademik (TPA): <i>Construct</i> yang terukur, Properti Psikometri, dan Utilitasnya sebagai Prediktor Keberhasilan Studi di Perguruan Tinggi (Urip Purwono, Ahmad Djunaidi)

No	KELOMPOK	
1	Analisa sikap terhadap aturan lalu-lintas komunitas bermotor (Lukman Hakim & Fathul Lubabin N.)	Kecenderungan Agresivitas Atas Nama Agama Islam Ditinjau dari Sikap Terhadap Perintah Jihad dan Ketaatan kepada Pemimpin (Muhammad Ariez Musthofa)
2	Predictors of Educational Attainment in Indonesia : Comparing OLS Regression and Quantile Regression Approach (Agung Santoso)	<i>Identity of Global Jihadist on Convicted Indonesian Bali Bombing Terrorist</i> (Mirra Noor Milla & Faturachman,)
3	Efektifitas Penetapan Tujuan dan Imajeri Mental dalam Belajar Keterampilan Gerak Teknik bermain Bulutangkis (Yusup Hidayat)	Kecenderungan mencari sensasi seksual dan perilaku seks berisiko: suatu studi meta analisis (Wahyu Rahardjo)



HIMPESI

Temu Ilmiah Nasional dan Kongres XI Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPESI)



KONGRES XI
HIMPESI 2010

Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPESI)
Memberikan Penghargaan kepada :

.....
yang telah berpartisipasi sebagai

.....
dalam Temu Ilmiah Nasional dan Kongres XI HIMPESI
yang diselenggarakan oleh HIMPESI pada tgl 18 - 20 Maret 2010 di Surakarta, Jawa Tengah

Surakarta, 20 Maret 2010

Dra. Retno Suhapti, SU., MA
Ketua Umum